

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil komunikasi politik anggota DPR RI tentang pansus Pelindo II di majalah parlementaria edisi 129 tahun 2015, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

#### **5.1. Kesimpulan**

Deputi bidang persidangan memiliki sub bagian biro pemberitaan parlemen untuk membantu dan memberi media kepada anggota DPR RI dalam menjalankan dan melakukan komunikasi politiknya di majalah Parlementaria. Biro pemberitaan parlemen bertanggung jawab langsung kepada deputi bidang persidangan. Terdapat 4 produk humas sebagai media untuk melakukan komunikasi anggota DPR produk tersebut ialah Majalah parlementaria, Buletin parlementaria, Tv parlemen, dan radio parlemen.

Peneliti mengamati melalui majalah parlementaria edisi 129 bahwa kasus Pelindo II merupakan kasus perpanjangan kontrak Pelindo II dengan mitranya. Anggota DPR RI Bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengamati bahwa Pelindo II tidak memenuhi syarat Undang-Undang yang berlaku dalam melakukan perpanjangan kontraknya. Akhirnya, anggota komisi III DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) yang diketuai oleh Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PDIP. Anggota pansus terdiri dari 30 orang anggota DPR RI dari berbagai macam fraksi dan komisi. Peneliti melihat bahwa terdapat 7 Anggota pansus dari komisi III, VI, dan IX yang melakukan komunikasi politik dimajalah parlementaria. Karena ketiga komisi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam bidang pengawasan. Selain anggota pansus, peneliti menemukan bahwa terdapat anggota DPR selain pansus yang mengkritisi kasus Pelindo II tersebut. Antara lain ketua dan wakil ketua DPR karena mereka memiliki kedudukan jabatan tertinggi di DPR RI.

Komunikasi politik erat kaitannya dengan aktor politik. aktor politik di majalah Parlementaria ialah anggota DPR RI yang berbicara mengenai kasus Pelindo II

sehingga pembaca hanya berfokus kepada kasus yang terjadi di Pelindo II. Peneliti melihat bahwa penyampaian pesan politik yang dilakukan oleh anggota DPR RI dikelola oleh tim redaktur media cetak. Pesan politik dikemas dalam sebuah artikel pemberitaan yang berisi judul, foto, dan rubrik. Selain itu, penggunaan media majalah parlementaria sebagai strategi komunikasi politik.

Komunikasi organisasi yang terjadi di dalam pemberitaan di parlementaria termasuk komunikasi organisasi secara internal karena terjadi komunikasi antara deputi sampai dengan reporter yang melakukan tugas untuk membuat berita.

Peran media majalah parlementaria dalam komunikasi politik anggota DPR tentang pansus Pelindo II adalah sebagai penyampai informasi mengenai kegiatan yang dilakukan anggota DPR RI, penyalur informasi mengenai kasus yang sedang terjadi di DPR RI khususnya kasus Pelindo II. Komunikasi penghubung antara anggota DPR RI dan pembaca dengan cara anggota DPR RI menyampaikan pesan informasi melalui rubrik, judul, dan gambar dalam setiap pembuatan artikel di majalah Parlementaria. Selain itu, Majalah parlementaria telah menjadi sarana umpan balik karena adanya umpan balik dari rakyat, yaitu dengan adanya rubrik sumbang saran. Rubrik ini selalu ada di majalah parlementaria. Sehingga komunikasi 2 arah yang terbentuk kecil karena masukan dari masyarakat di muat di edisi berikutnya dan tidak semua saran di muat di edisi berikutnya. Sosialisasi politik memberikan edukasi dan sosialisasi kepada rakyat secara luas terkait berita yang dimuat di majalah parlementaria pada setiap edisinya terdapat rubrik pojok parlemen berupa kunjungan anggota DPR RI ke daerah pilihannya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, anggota DPR RI melakukan kontrol sosial berupa kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk meninjau program kerja yang sedang berlangsung. Sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja yang dilakukan anggota DPR tersebut.

Peneliti melihat bahwa di dalam pembuatan artikel di majalah Parlementaria terdapat manajemen media sebelum berita dimuat sampai dengan berita selesai dan siap di muat. Agar berita tersebut layak untuk di muat Peneliti melihat bahwa reporter dalam membuat sebuah berita harus mengacu pada 5W+1H supaya berita

yang dimuat memiliki kualitas yang baik dan bermutu. Reporter didalam membuat berita di majalah parlementaria harus membuat minimal 3 berita dalam satu hari. Selain itu, agar berita tersebut layak untuk dimuat di majalah Parleментарia reporter dalam melakukan peliputan harus memiliki landasan nilai-nilai berita yang ada di majalah Palementaria Setelah nilai berita tersebut dimuat dalam membuat berita, reporter melakukan wawancara kepada narasumber yang berada di lapangan untuk menambah data berita yang dimuat didalam majalah parlementaria. Sehingga, artikel berita siap dimuat dalam edisi berikutnya.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ditemukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, peneliti melihat bahwa majalah parlementaria merupakan media komunikasi politik setiap anggota DPR RI. Tetapi di setiap edisinya tidak semua fraksi atau komisi melakukan komunikasinya. Peneliti memberikan saran bahwa adanya pemerataan komunikasi politik setiap fraksi dan komisi supaya pembaca dapat mengetahui program kerja yang dilakukan oleh setiap anggotanya.

Kedua, studi ini perlu dilanjutkan untuk mengetahui bagaimana media majalah Parleментарia dapat dijadikan tempat untuk melakukan komunikasi politik maupun menganalisis bagaimana pengelolaan manajemen media. Karena masih ada hal yang perlu digali dari komunikasi politik dan manajemen media di Indonesia.